# PERSEPSI MAHASISWA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG TERHADAP MONEY POLITICS PEMILU 2024

**Andeta[1], Suryanef[2], Al Rafni[3], Oktaviani Puspita Sari[4]**

[1,2,3,4]*Universitas Negeri Padang*
E-mail: suryanef@fis.unp.ac.id

## ABSTRAK

Pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana penting dalam mewujudkan kedaulatan rakyat di negara demokratis. Namun, praktik money politics atau politik uang masih menjadi permasalahan serius yang mengancam integritas pemilu di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Padang terhadap praktik money politics pada Pemilu 2024 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik proportional stratified random sampling terhadap 129 responden mahasiswa tahun masuk 2021 dan 2022. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara, kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif dalam bentuk persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki tingkat pengetahuan dan kesadaran yang baik terhadap bahaya money politics. Sebanyak 61,2% responden memiliki pemahaman baik hingga sangat baik, 95,4% menyatakan bahwa money politics merupakan masalah serius bagi demokrasi, dan 88,5% menyatakan siap melaporkan praktik tersebut kepada lembaga pengawas pemilu. Meskipun demikian, masih ditemukan sebagian kecil mahasiswa yang bersikap permisif terhadap praktik money politics karena pengaruh lingkungan sosial dan budaya politik pragmatis. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan pendidikan politik dan nilai-nilai etika demokrasi di lingkungan kampus guna membentuk generasi muda yang berintegritas dan anti terhadap politik uang.

**Kata Kunci :** *Persepsi Mahasiswa, Money Politics, Pemilu 2024*

**ABSTRACT**

General elections are an essential instrument for realizing people's sovereignty in a democratic state. However, money politics remains a serious problem that threatens the integrity of elections in Indonesia. This study aims to describe the perceptions of students in the Civic and Pancasila Education Study Program at Universitas Negeri Padang toward money politics practices in the 2024 General Election and to identify the factors influencing these perceptions. The research employed a descriptive quantitative method using a proportional stratified random sampling technique involving 129 respondents from the 2021 and 2022 student cohorts. Data were collected through questionnaires and interviews, then analyzed using descriptive statistics in percentage form. The results showed that most students have good knowledge and awareness of the dangers of money politics. A total of 61.2% of respondents demonstrated good to very good understanding, 95.4% agreed that money politics is a serious problem for democracy, and 88.5% stated their willingness to report such practices to election supervisory bodies. However, a small number of students were still permissive toward money politics due to social environment influences and pragmatic political culture. These findings emphasize the importance of strengthening political education and democratic ethics in universities to shape young generations with integrity and resistance to political corruption.

**Keywords :** *Student Perception, Money Politics, 2024 Election*

## PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang menjadi sarana bagi rakyat untuk menyalurkan kedaulatannya secara langsung. Melalui pemilu, masyarakat memiliki kesempatan untuk menentukan arah kebijakan politik dan pemerintahan berdasarkan prinsip kebebasan, keadilan, serta tanggung jawab. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pemilu di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan serius, salah satunya adalah *money politics* atau politik uang yang mencederai nilai-nilai demokrasi (Budiardjo, 2013:117). Praktik ini dilakukan dengan memberikan uang atau imbalan materi kepada pemilih untuk memengaruhi pilihan politik mereka. Fenomena tersebut menggeser orientasi pemilih dari rasionalitas menuju kepentingan transaksional, yang pada akhirnya merusak integritas demokrasi dan menurunkan kualitas pemimpin yang terpilih (Robinson dkk., 2013:49).

Menurut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI, 2019), *money politics* merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang paling banyak ditemukan dalam setiap penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Kondisi ini semakin kompleks pada Pemilu 2024 yang berlangsung di era digital, di mana media sosial menjadi sarana baru bagi praktik politik transaksional. Survei LIPI (2020) menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menganggap *money politics* sebagai hal yang wajar atau sebagai "rezeki menjelang pemilu". Pandangan permisif ini mencerminkan lemahnya literasi politik serta rendahnya kesadaran demokratis di kalangan pemilih.

Mahasiswa, sebagai bagian dari generasi muda yang berpendidikan, memiliki peran strategis dalam menjaga integritas demokrasi. Terutama mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), yang dibekali dengan pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai demokrasi, etika politik, dan prinsip konstitusi. Mereka diharapkan tidak hanya memahami teori demokrasi secara konseptual, tetapi juga mampu menunjukkan sikap kritis terhadap praktik politik yang tidak etis, termasuk *money politics*. Namun, realitas menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan dalam cara mahasiswa memahami dan menyikapi praktik tersebut. Sebagian menolak dengan tegas karena dianggap bertentangan dengan moral dan etika politik, sementara sebagian lainnya menunjukkan sikap permisif akibat pengaruh sosial, budaya politik pragmatis, atau rendahnya kepedulian terhadap proses demokrasi.

Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penelitian mengenai persepsi mahasiswa terhadap praktik *money politics*, khususnya pada mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Padang. Sebagai calon pendidik dan pembina karakter bangsa, persepsi mereka memiliki makna strategis dalam upaya membangun kesadaran politik yang bersih, jujur, dan berintegritas. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana tingkat pemahaman, sikap, dan kecenderungan tindakan mahasiswa terhadap praktik *money politics* dalam pemilu, serta bagaimana faktor internal dan eksternal membentuk persepsi tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penguatan pendidikan politik dan pengembangan kurikulum kewarganegaraan yang lebih kontekstual dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi dan integritas pada generasi muda.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan persepsi mahasiswa terhadap praktik *money politics* dalam Pemilu 2024 secara objektif dan terukur. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menganalisis data

dalam bentuk angka dan persentase guna mengetahui tingkat pengetahuan, sikap, serta kecenderungan tindakan mahasiswa. Desain penelitian bersifat non-eksperimental, di mana peneliti tidak memberikan perlakuan tertentu, melainkan mengamati fenomena sebagaimana adanya. Prosedur penelitian meliputi tahap penyusunan instrumen, penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert, pengumpulan data, serta verifikasi hasil melalui wawancara pendukung untuk memperkuat temuan.

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Padang tahun masuk 2021 dan 2022 dengan jumlah keseluruhan 190 responden. Sampel penelitian ditentukan sebanyak 129 responden menggunakan teknik proportional stratified random sampling agar setiap strata tahun masuk memiliki perwakilan yang proporsional. Data primer diperoleh melalui kuesioner dan wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi program studi serta literatur ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara statistik deskriptif menggunakan perhitungan persentase untuk mengidentifikasi kecenderungan persepsi mahasiswa berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan faktual mengenai persepsi mahasiswa terhadap praktik *money politics* tanpa mengubah kondisi alami yang diteliti.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melibatkan 129 mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Padang tahun masuk 2021 dan 2022. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik proportional stratified random sampling. Berdasarkan hasil identifikasi, sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 109 orang (84,5%), sedangkan laki-laki berjumlah 20 orang (15,5%). Berdasarkan tahun masuk, sebanyak 65 responden (50,38%) berasal dari angkatan 2021 dan 64 responden (49,61%) berasal dari angkatan 2022. Komposisi ini menunjukkan keterwakilan yang seimbang antara kedua angkatan.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap praktik *money politics* dalam pemilu 2024 termasuk dalam kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis pada tiga dimensi persepsi, yaitu kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan konatif (tindakan).

**Tabel 1. Pemetaan Pengetahuan Mahasiswa tentang *Money politics***

| Kategori Pengetahuan | Jumlah Mahasiswa | Persentase (%) |
|---|---|---|
| Sangat Baik (8–10 benar) | 32 | 24,8 |
| Baik (6–7 benar) | 47 | 36,4 |
| Cukup Baik (4–5 benar) | 28 | 21,7 |
| Kurang Baik (2–3 benar) | 15 | 11,6 |
| Sangat Tidak Baik (0–1 benar) | 7 | 5,4 |
| **Jumlah** | **129** | **100** |

*Sumber: Data primer diolah (2025)*

Hasil pada Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki pengetahuan baik hingga sangat baik (61,2%) mengenai pengertian, bentuk, dan dampak *money politics* terhadap demokrasi. Mahasiswa mampu menjelaskan bahwa politik uang merupakan tindakan yang mencederai asas kejujuran dan keadilan pemilu. Namun, masih terdapat 17 persen mahasiswa

yang memiliki pengetahuan rendah, menunjukkan perlunya peningkatan literasi politik dan pemahaman hukum pemilu melalui kegiatan akademik.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Rohmah (2021) yang menyatakan bahwa literasi politik berpengaruh terhadap sikap mahasiswa dalam menolak politik uang. Artinya, semakin tinggi tingkat pengetahuan politik seseorang, semakin besar pula kemungkinan ia memiliki persepsi kritis terhadap praktik politik yang menyimpang.

**Tabel 2. Sikap Mahasiswa terhadap *Money politics* sebagai Masalah Serius**

| Kategori Jawaban | Jumlah Mahasiswa | Persentase (%) |
|---|---|---|
| Sangat Setuju | 29 | 22,3 |
| Setuju | 94 | 73,1 |
| Tidak Setuju | 3 | 2,3 |
| Sangat Tidak Setuju | 3 | 2,3 |
| **Jumlah** | **129** | **100** |

*Sumber: Data primer diolah (2025)*

Berdasarkan Tabel 2, sebanyak 95,4 persen mahasiswa menyatakan bahwa *money politics* merupakan permasalahan serius dalam sistem demokrasi di Indonesia. Mahasiswa menilai praktik tersebut sebagai tindakan tidak etis yang menurunkan kualitas demokrasi dan keadilan dalam pemilu. Hanya sebagian kecil mahasiswa (4,6%) yang menunjukkan sikap permisif terhadap praktik politik uang dengan alasan bahwa fenomena tersebut sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat.

Hasil ini menunjukkan bahwa mahasiswa PPKn Universitas Negeri Padang memiliki kesadaran moral dan tanggung jawab politik yang tinggi. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Faqi dkk. (2023) yang menyatakan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki pandangan negatif terhadap politik uang, meskipun masih terdapat segelintir mahasiswa yang menganggapnya sulit dihindari dalam praktik politik Indonesia.

**Tabel 3. Tindakan Mahasiswa terhadap Praktik *Money politics***

| Jenis Tindakan | Jumlah Mahasiswa | Persentase (%) |
|---|---|---|
| Bersedia melaporkan praktik *money politics* | 114 | 88,5 |
| Siap berpartisipasi dalam kampanye penolakan | 116 | 90,0 |
| Menolak pemberian uang/barang dari peserta pemilu | 55 | 42,3 |
| **Tidak menolak secara tegas** | 14 | 10,8 |

*Sumber: Data primer diolah (2025)*

Hasil pada Tabel 3 menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki kecenderungan bertindak aktif dalam menolak dan mencegah praktik *money politics*. Sebanyak 88,5 persen mahasiswa menyatakan kesediaan untuk melaporkan pelaku politik uang kepada lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu, dan 90 persen menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi dalam kampanye penolakan politik uang di lingkungan kampus. Namun demikian, masih terdapat sekitar 10 persen mahasiswa yang belum berani menolak secara tegas jika dihadapkan dengan tawaran materi, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan tindakan nyata.

Temuan ini mengindikasikan bahwa walaupun tingkat kesadaran moral mahasiswa tergolong tinggi, perlu adanya pembinaan karakter politik dan pelatihan etika publik secara berkelanjutan agar mahasiswa memiliki keberanian dan komitmen kuat dalam menjaga integritas demokrasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data terbuka, terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi persepsi mahasiswa terhadap praktik *money politics*, antara lain pendidikan politik, lingkungan sosial, media informasi, dan kondisi ekonomi. Pendidikan politik memiliki pengaruh besar terhadap kemampuan mahasiswa memahami dan menilai praktik politik uang. Mahasiswa yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan diskusi politik memiliki pemahaman yang lebih kritis dibandingkan mahasiswa yang pasif. Lingkungan sosial, seperti pengaruh teman sebaya dan budaya akademik kampus, juga turut membentuk persepsi terhadap pentingnya pemilu yang jujur dan adil. Selain itu, media informasi berperan dalam meningkatkan kesadaran politik melalui penyebaran isu terkait pelanggaran pemilu, sedangkan kondisi ekonomi sebagian mahasiswa menjadi faktor yang dapat memengaruhi sikap permisif terhadap praktik pemberian materi dari peserta pemilu.

Hasil ini sejalan dengan teori persepsi yang dikemukakan oleh Walgito (2010), bahwa persepsi individu terbentuk dari faktor internal, seperti nilai, pengalaman, dan pengetahuan, serta faktor eksternal, seperti lingkungan sosial dan situasi yang dihadapi. Dalam konteks penelitian ini, kedua faktor tersebut saling berinteraksi dan membentuk persepsi mahasiswa terhadap fenomena *money politics*.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Padang memiliki persepsi yang positif dan kritis terhadap praktik *money politics*. Mahasiswa tidak hanya memahami dampak negatif politik uang, tetapi juga menunjukkan kesadaran moral dan tindakan nyata dalam menolak praktik tersebut. Hasil ini mendukung konsep civic disposition dalam pendidikan kewarganegaraan, yaitu pembentukan sikap dan perilaku warga negara yang berlandaskan nilai moral, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

Temuan ini juga memperkuat pandangan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter politik generasi muda. Melalui pembelajaran yang berbasis nilai demokrasi dan etika publik, mahasiswa tidak hanya menjadi penerima pengetahuan, tetapi juga agen perubahan sosial yang aktif dalam menjaga integritas demokrasi.

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Pratama (2019) dan Andriansyah (2020), ditemukan peningkatan kesadaran politik mahasiswa terhadap isu politik uang. Pada penelitian terdahulu, sebagian mahasiswa masih bersikap permisif karena alasan pragmatis dan tekanan ekonomi. Namun, dalam penelitian ini mayoritas mahasiswa menunjukkan sikap tegas menolak praktik politik uang, yang menandakan peningkatan efektivitas pendidikan politik di lingkungan perguruan tinggi, khususnya pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Padang.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap *money politics* mencerminkan keberhasilan internalisasi nilai-nilai Pancasila dan demokrasi dalam proses pendidikan kewarganegaraan. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan bidang studi pendidikan kewarganegaraan, terutama dalam memperkuat pendidikan politik berbasis karakter dan moral bangsa yang berintegritas.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Padang memiliki persepsi yang positif dan kritis terhadap praktik *money politics* pada Pemilu 2024. Mahasiswa memahami bahwa

politik uang merupakan pelanggaran terhadap nilai demokrasi, menunjukkan sikap menolak dengan tegas, serta memiliki kemauan untuk bertindak aktif dalam mencegah dan melaporkan praktik tersebut. Faktor yang memengaruhi persepsi mahasiswa meliputi pendidikan politik, lingkungan sosial, media informasi, dan kondisi ekonomi. Pendidikan politik di lingkungan kampus berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran moral dan komitmen terhadap nilai demokrasi yang bersih.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pendidikan kewarganegaraan telah berhasil menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dan etika politik ke dalam diri mahasiswa. Implikasinya, diperlukan penguatan pendidikan politik berbasis karakter di perguruan tinggi guna menumbuhkan kesadaran dan keberanian mahasiswa dalam menolak politik uang.Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji pengaruh literasi politik dan media sosial terhadap sikap politik mahasiswa guna memperluas pemahaman tentang peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun budaya politik yang berintegritas.

## DAFTAR PUSTAKA

Andriansyah, M. (2020). Persepsi mahasiswa terhadap praktik politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 7(2), 112–121.

Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. (2019). Laporan pengawasan pemilu 2019: Pelanggaran dan penegakan hukum pemilu. Jakarta: Bawaslu RI.

Budiardjo, M. (2013). Dasar-dasar ilmu politik (Edisi Revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Faqi, N., Sari, E., & Rakhmawati, D. (2023). Sikap mahasiswa terhadap praktik politik uang di kalangan pemilih muda. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 13(1), 55–65.

Pratama, R. (2019). Pengaruh pendidikan politik terhadap perilaku politik mahasiswa. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 16(2), 123–134.

Robinson, M., dkk. (2013). Democracy and political corruption in Southeast Asia. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Rohmah, S. N. (2021). Literasi politik mahasiswa dan implikasinya terhadap perilaku pemilih muda. Jurnal Politik dan Pendidikan, 10(1), 45–58.

Survei LIPI. (2020). Pandangan masyarakat terhadap politik uang menjelang pemilu 2024. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Walgito, B. (2010). Psikologi sosial: Suatu pengantar. Yogyakarta: Andi Offset.